

Wali Kota Diminta Turun Tangan

Pembebasan Jalan Tol Jampea-Yos Sudarso belum ada titik temu.

KEBON SIRIH — Pembangunan Jalan Tol Jampea-Yos Sudarso masih terkendala persetujuan warga. Warga pemilik lahan yang terkena pembebasan lahan belum menyepakati harga yang ditawarkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan, telah menginstruksikan Wali Kota Jakarta Utara Bambang Sugiyono untuk menangani hal ini. "Memang selama ini tim dari proyek tersebut tidak bisa memecahkan masalah, jadi saya perintahkan wali kota," ujarnya di balai kota, Jumat (26/4).

Ia berjanji, akan turun tangan jika mediasi antara warga dan Kementerian PU yang dibantu dengan wali kota gagal. Masalah yang masih menghambat proyek

Jalan Tol Seksi NS Link Simpang Jampea-Yos Sudarso adalah menolak harga ganti rugi yang ditawarkan pemerintah sebesar Rp 12 juta per meter. Warga di wilayah tersebut menginginkan harga ganti rugi sebesar Rp 35 juta per meter. Tapi, harga ini jauh di atas plafon yang dimiliki pemerintah.

Padahal, kontrak pengerjaan proyek tersebut sudah akan berakhir. Berdasarkan kontrak kerja, proyek akan berakhir pada Agustus 2013. Saat ini, proyek yang baru selesai dikerjakan hanya 20 petak. Sedangkan, untuk proyek tersebut Kementerian PU harus menyelesaikan sebanyak 80 petak.

Proyek senilai lebih dari Rp 1 triliun ini pun akhirnya terganjal masalah ganti rugi lahan dan konflik kepentingan berbagai pihak. Pembangunan jalan tol Tanjung Priok dibagi menjadi lima seksi, yaitu seksi E1 Rorotan-Cilincing, seksi E2 Cilincing-Jampea, seksi E2A Jampea-Simpang Jampea, seksi NS Link Simpang Jampea-

Yos Sudarso, dan seksi NS Direct Ramp.

Kepala Besar Pelaksanaan Jalan Nasional IV Bambang Hartadi mengatakan, pembangunan di seksi NS Link Simpang Jampea-Yos Sudarso mendesak. Kementerian PU sebelumnya sudah meminta bantuan Gubernur Jokowi agar memediasi antara warga dengan Kementerian PU.

Jokowi, menurutnya, berjanji bahwa solusi akan diberikan selambatnya pada akhir April 2013. Kini, pengerjaan fisik jalan tol yang akan digunakan untuk memperlancar arus barang dan kendaraan di wilayah utara Jakarta itu pun *mangkrak*. Pekerja tidak bisa memasang pilar karena rakyat tidak mau menerima ganti rugi yang ditetapkan pemerintah.

Saat ini, baru sekitar 20 petak dari total 80 petak tanah warga yang bisa digarap Kementerian PU. Jika sisa tanah tidak bisa dibebaskan, proyek ini terancam mandek. "Hanya ada dua kemung-

kinan, perpanjang kontrak atau sekalian diputus kontraknya. Tapi kalau putus kontrak, konsekuensinya ada pekerjaan yang tidak selesai," ujar Bambang.

Di luar masalah dengan warga, proyek ini juga masih menghadapi kendala lainnya. Kementerian PU juga masih menghadapi masalah dalam menggarap seksi E2 Cilincing-Jampea dan seksi E2A Jampea-Simpang Jampea. Pelindo sebagai pemilik lahan secara legal belum menemukan kata sepakat dengan permukim lama.

Alhasil, Kementerian PU belum bisa membayarkan ganti rugi untuk pembebasan lahan. Saat ini, Kementerian PU baru menyelesaikan pembangunan di seksi E1 Rorotan-Cilincing sepanjang 3,4 kilometer. Proses konstruksi sudah selesai dan telah berfungsi sementara tanpa dikenakan tarif. Bambang masih optimistis pembangunan Jalan Tol Tanjung Priok bisa selesai tepat waktu. ■ c 72/meilia-ni fauziah ed: wulan tunjung palupi